

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini mengenai wacana TKW dalam novel Indonesia yang berjudul “Aku Bukan Budak” karya Astina Triutami dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” karya Ummuki. Analisis penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana milik Sara Mills. Wacana yang dimaksudkan di sini terkait dengan wacana mengenai perempuan yang menjadi TKW digambarkan sebagai kaum yang termarginalkan melalui narasi-narasi oleh sang penulis novel. TKW yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah TKW yang bekerja pada sektor informal atau ranah privat, yaitu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Peneliti menganalisis bagaimana wacana TKW diartikulasikan dalam kedua novel tersebut. Fokus penelitian lebih kepada bagaimana penulis mengartikulasikan wacana TKW melalui representasi tokoh utama dan juga beberapa tokoh pendukung yang bekerja sebagai TKW. Peneliti menganalisis dengan melihat hubungan yang terjadi antara TKW dengan sistem maupun lingkungan di sekitarnya, seperti hubungan TKW dan kapitalisme, hubungan TKW dengan majikan, serta hubungan antar sesama TKW.

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai TKW sebab peneliti seringkali melihat adanya pemberitaan di media massa mengenai perlakuan terhadap para TKW yang terkesan memarginalkan mereka. Pemberitaan yang berulang itu merupakan suatu diskursus atau wacana yang berkembang di

masyarakat dan diasumsikan akan berulang pada media massa populer sekalipun. Peneliti memilih novel sebagai teks sebab peneliti melihat karakteristik novel yang unik yaitu sebagai media massa populer dan juga sebagai *hot media*. Dalam bukunya yang berjudul *Understanding Media: The Extensions of Man*, McLuhan mendefinisikan *hot media* sebagai media yang hanya mengandalkan satu indera saja untuk menangkap pesannya (*high definition*). Audiens yang dalam hal ini adalah pembaca, harus fokus dengan media yang sedang dikonsumsi karena proses komunikasi berjalan secara linear (dalam Bobbitt 2011). Dengan karakteristik novel tersebut, novel mampu menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda-beda di benak pembaca. Hal ini dikarenakan ketika membaca sebuah novel seseorang akan berimajinasi sesuai kehendak pribadinya dengan berlandaskan *frame of reference* dan *field of experience* yang mereka miliki.

Novel menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Melalui bahasa itulah pengarang menceritakan mengenai kisahnya, baik berupa fiksi maupun nonfiksi, ke dalam suatu karya. Novel dianggap mampu ‘merefleksikan realitas, nilai-nilai, serta norma di masyarakat’ (O’Saughnessy 2006, h.35). Bahasa dalam hal ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang netral. Habermas menyebutkan bahwa ‘bahasa selalu menjadi medium dominasi dan sistem reproduksi material dan ideasional’ (Adiptoyo 2004, h.10). Pemilihan dan penggunaan bahasa juga merupakan wujud dari kekuasaan yang biasanya didominasi oleh kelompok dominan.

Novel merupakan media massa yang unik karena novel juga merupakan sebuah karya sastra. Novel memiliki beberapa karakteristik yang menarik dibandingkan karya sastra yang lain. Salah satunya yaitu karakteristik novel yang

dianggap sebagai karya fiksi namun sebenarnya juga merupakan suatu gambaran realitas. Hal ini dikarenakan dalam menyusun narasinya, seorang penulis novel tentu dipengaruhi oleh *frame of reference* maupun *field of experience* yang tidak lepas dari struktur ekonomi, politik, maupun sosial budaya yang ada di sekitarnya. Realitas yang ada dalam novel itu kemudian menjadi realitas kedua (*secondhand reality*). Realitas kedua ini bisa juga disebut sebagai representasi.

Representasi merupakan ‘tindakan menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol’ (Piliang 2003, h.21). Penulis berusaha mengartikulasikan wacana TKW dengan merepresentasikan sosok TKW melalui narasi-narasi novelnya. Menurut McQuail ‘representasi yang ditampilkan media massa dapat mempengaruhi persepsi dan definisi masyarakat mengenai realitas sosial, termasuk identitas sosok tertentu’ (dalam Fitranisa 2011, h.I-2). Hal ini bisa menimbulkan gambaran realitas sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat yang kemudian disebut dengan stereotipe. Contoh stereotipe tersebut misalnya TKW yang ditampilkan sebagai perempuan yang bodoh/ berpendidikan rendah, dan lain sebagainya dalam media massa.

Yang biasanya direpresentasikan dalam suatu media adalah identitas. Stuart Hall dalam bukunya *The Question of Cultural Identity* mengungkapkan bahwa identitas muncul sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendefinisikan siapa dirinya (1996). Identitas bukanlah sesuatu yang sifatnya tunggal. Identitas dikonstruksi melalui beragam wacana, posisi, dan aturan. Identitas merupakan produk dari perkembangan sejarah, berproses terus menerus, serta dikarakteristikan oleh perubahan. Sebagai sesuatu yang *fluid* dan

berubah-ubah, identitas tidak pernah lepas dari permainan kekuasaan yang melingkupinya.

Kedua novel yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan novel-novel Indonesia yang menceritakan mengenai kisah TKW yang dituliskan oleh perempuan. Kedua penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai TKW. Mereka menggunakan referensi pengalamannya itu untuk menuliskan novelnya. Kedua penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Mereka menggunakan sudut pandang orang pertama untuk mengisahkan ceritanya dengan tokoh sentral “aku”. Dalam sudut pandang tersebut, penulis bertindak sebagai narator yang terlibat dalam cerita, tokoh yang mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui, dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang (tokoh) lain kepada pembaca (Nurdiyantoro 2007).

Seperti yang diketahui, perempuan dalam bingkai media seringkali digambarkan sebagai kaum marjinal. Dalam budaya Indonesia yang masih menganut budaya patriarki, perempuan dianggap sebagai kaum kedua yang kedudukannya berada di bawah laki-laki. Istilah patriarki merujuk pada:

hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi sebagai penentu utama bagaimana laki-laki dan perempuan akan direpresentasikan dalam budaya populer serta bagaimana mereka akan merespon representasi tersebut (Strinati 2004, h.227).

Salah satu bentuk patriarki itu adalah perempuan dianggap lemah dan tenaganya dianggap hanya mampu mengurus masalah domestik atau rumah tangga saja. Tenaga itu dianggap tidak memiliki nilai jual. Walaupun bekerja, pekerjaan perempuan pun merupakan perpanjangan dari pekerjaan domestik,

misalnya seperti pekerjaan yang dilakukan para TKW yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Upah yang didapat perempuan pun tidak setara dengan kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan hanya dianggap sebagai penyokong suami karena fungsi produksi dalam keluarga selama ini dianggap melekat pada kaum laki-laki.

Perempuan dalam media juga seringkali dianggap bodoh. Seperti perempuan yang menjadi TKW, mayoritas digambarkan tidak lulus SMA dan menjadi TKW akibat desakan keadaan ekonomi keluarga. Mereka dipaksa untuk menggantikan peran suami atau ayah sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan bertanggungjawab untuk memperbaiki perekonomian keluarga serta membiayai sekolah anak-anaknya maupun adik-adiknya. Hal-hal tersebutlah yang seringkali ditampilkan dalam media massa Indonesia. Contohnya adalah pemberitaan mengenai kasus TKW Wilfrida yang digambarkan sebagai orang miskin, tidak berpendidikan dan berjiwa labil sehingga bisa membunuh majikannya (Ramadhiani 2014).

Tidak hanya dominasi dari kaum laki-laki atau patriarki, para perempuan seringkali juga didominasi oleh sistem yang ada, misalnya kapitalisme dan juga negara yang dalam konteks heteronormativitas dianggap sebagai laki-laki. Dominasi dari kapitalisme misalnya seperti perempuan yang dieksploitasi untuk kepentingan materi. Contohnya ketika para perempuan dijadikan model iklan yang dieksploitasi tubuhnya. Sedangkan dominasi negara misalnya seperti tidak adanya perlindungan hukum yang kuat dan adil bagi para perempuan, khususnya TKW, baik pada masa pra-saat-dan setelah menjadi TKW; pemberian beban pajak

yang tinggi; serta tidak adanya pemberian fasilitas memadai dari pemerintahan bagi para TKW yang akan berangkat ke luar negeri. Pemberian gelar sebagai “pahlawan devisa” seakan hanya menjadi hiburan semata.

Akibat kedudukannya sebagai kaum kedua, perempuan atau yang dalam penelitian ini yaitu TKW, seringkali mengalami tindak kekerasan berbasis gender. Banyak kasus-kasus yang ditampilkan media Indonesia berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh para TKW. Misalnya saja kasus yang menimpa Nirmala Bonat, TKW asal NTT yang bekerja di Malaysia, yang ramai di pemberitaan media pada 2004; kasus pemerkosaan TKW oleh 3 oknum polisi Malaysia pada November 2012; kasus Erwiana, TKW asal Sragen yang disiksa majikannya di Hong Kong; dan yang terbaru mengenai kasus hukuman mati kepada Satinah yang akhirnya dibayarkan dendanya oleh pemerintahan Indonesia. Selain beberapa contoh kasus tersebut, masih banyak kasus-kasus lain mengenai kekerasan yang menimpa para TKW yang diberitakan oleh media Indonesia.

Menurut UU No.39 Tahun 2004, TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan TKW sendiri lebih menspesifikkan pada TKI yang berjenis kelamin wanita. TKW umumnya bekerja pada sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pelayan restoran, dan atau pekerjaan-pekerjaan sejenis itu.

Penggerakan buruh dalam konteks keterlibatan atau intervensi negara dan menjadi perkembangan dari pembagian tata kerja internasional, telah berlangsung

sejak masa kolonial (abad XIX), bersamaan dengan politik etik yang diterapkan di Hindia Belanda. Hal tersebut menjadi program andalan pada awal pemerintahan Orde Baru melalui strategi pembangunanisme, pengerahan buruh migran atau yang biasa dikenal dengan TKW (Farida 2007).

Gelombang pertama pengiriman buruh migran terjadi ketika ada “*oil boom*” pada tahun 1970-an. Para buruh migran itu menuju negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1980-an. Para buruh migran berangkat ke Asia Timur yang tengah memacu pertumbuhan ekonomi seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Pada tahun 1985 telah mencapai 3,9 juta orang yang menjadi buruh migran (Matsui 2002).

Menurut *International Organization for Migration* (IOM) jumlah migran internasional telah meningkat dari 150 juta orang di tahun 2000 menjadi 214 juta orang di tahun 2010. Tingginya permintaan tenaga kerja di negara maju dan ketersediaan tenaga kerja di negara berkembang menjadi faktor yang meningkatkan kegiatan migrasi internasional. Kementerian Luar Negeri mencatat tidak kurang dari 3.091.284 Warga Negara Indonesia saat ini berada di luar negeri di mana 58,9% diantaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Hidayatunnismah, Anggraeni, & Pertiwi 2013).

Beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin menjadi TKI/ TKW diantaranya adalah angka pengangguran yang tinggi, minimnya lapangan pekerjaan di negeri sendiri dan semakin naiknya

kebutuhan hidup di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mendukung pengiriman TKI/TKW ke luar negeri sebab mereka memberikan pemasukan devisa yang cukup besar pada negara. Di sisi lain pemerintah juga tidak bisa melarang seseorang yang ingin bekerja di luar negeri karena itu merupakan hak mereka sebagai manusia merdeka.

Karena bekerja pada sektor informal yang biasanya berada pada ranah privat, kekerasan terhadap TKW tersebut rentan terjadi. Publik tidak bisa ikut mengawasi dan ikut campur karena menganggap urusan rumah tangga adalah urusan privat. Kekerasan yang terjadi pada TKW itu juga tidak lepas dari ideologi yang selama ini dianggap menyebabkan ketimpangan gender yakni ideologi patriarki.

Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan pada umumnya mengambil bentuk dominasi oleh kaum laki-laki serta diskriminasi terhadap perempuan. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai ketimpangan gender. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari berbagai wujud relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang timpang itu secara nyata mengakibatkan dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan.

Coral Smart dalam Farida (2007) menyatakan lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun

negara. Dalam hal tersebut laki-laki dibenarkan untuk memiliki kekuasaan terhadap perempuan.

Perbedaan gender bukanlah suatu masalah ketika dia tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun pada praktik yang terjadi, perbedaan gender ini menimbulkan ketidakadilan gender, khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan ini hadir dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah ‘marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan stereotipe negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak, sosialisasi ideologi peran gender, serta subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik’ (Fakih 1996, h.13).

Lebih lanjut Fakih menjelaskan, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan (1996). Dalam penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa negara sebagai institusi legal, yang dalam konteks heteronormativitas dianggap sebagai laki-laki, turut andil dalam mengkonstruksi perbedaan gender yang akhirnya menyebabkan ketimpangan gender.

Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari, serta harapan-harapan yang dikaitkan pada

perempuan dan laki-laki. Murniati dalam bukunya *Getar Gender* (2004) menyatakan bahwa bentuk dari ketidakadilan gender ini dapat berupa:

1. Marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, tidak rasional, tidak berani sehingga tidak pantas memimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin.
2. Stereotipe masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotipe masyarakat, yakni pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki di kotak-kotakkan pada tindakan pantas dan tidak pantas, sehingga tidak dapat keluar dari kotak yang membakukan tersebut.
3. Subordinasi terhadap perempuan. Pandangan yang memosisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu, sehingga diberi tugas yang mudah. Mereka selalu khawatir apabila suatu pekerjaan yang berat atau hebat ditangani oleh perempuan.
4. Beban ganda. Perempuan yang bekerja di sektor publik nyatanya masih diberikan tugas rumah tangga dalam keluarga.
5. Kekerasan terhadap perempuan. Stereotipe laki-laki atas perempuan juga sampai pada ungkapan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Kekuasaan ini terungkap dalam wujud fisik, psikis, verbal maupun nonverbal.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa salah satu wujud dari ketidakadilan gender pada perempuan adalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (Farida 2007).

Para perempuan yang bekerja sebagai TKW bisa dikatakan mengalami berbagai lapis bentuk kekerasan, yaitu kekerasan berbasis gender, berbasis ras, dan berbasis kelas. Kekerasan berbasis gender terjadi karena TKW berjenis kelamin perempuan, kekerasan berbasis ras terjadi karena mayoritas majikan yang berasal dari luar negeri menganggap orang dari ras Indonesia lebih rendah dan lebih bodoh, sedangkan kekerasan berbasis kelas terjadi karena majikan merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan TKW yang bekerja sebagai pembantu.

Menurut pemantauan Komnas Perempuan, pada tahun 1998 – 2010 ada 6.266 kasus kekerasan seksual yang dialami pekerja migran, belum termasuk 366 buruh wanita yang meninggal teraniaya. Kekerasan terhadap TKW sebenarnya sudah dimulai sejak pemberangkatan, misalnya seperti pelecehan dan penyiapan dokumen palsu, di tempat kerja seperti gaji tidak dibayar dan dokumen penting ditahan majikan, dan saat kepulangan ke kampung halaman ada pungutan liar yang dilakukan oleh petugas bandara dan oleh oknum-oknum di terminal Selapajang, hingga petugas travel yang disiapkan petugas terminal. Terjadi

ketidakadilan yang menerpa TKW yang sudah bekerja keras, meninggalkan keluarga ribuan mil jaraknya, tetapi media, masyarakat, dan pemerintah cenderung merendahkan dan memarjinalkan TKW (Artini 2011).

Penelitian mengenai wacana perempuan yang menjadi TKW dalam novel ini kemudian menjadi menarik karena tema ini jarang diangkat sebelumnya. Terlebih lagi objek dari penelitiannya adalah karya TKW itu sendiri. Namun telah banyak juga penelitian yang membahas mengenai wacana maupun representasi TKW dalam media. Karakteristik yang menarik lainnya adalah kedua penulis dari kedua novel itu adalah perempuan. Jika selama ini media cenderung menggunakan sudut pandang *male gaze* dalam menampilkan sosok perempuan (Noviani 2006), maka dalam penelitian ini secara tidak langsung juga melihat bagaimana penulis perempuan merepresentasikan kaumnya. Melalui narasinya bisa dilihat juga apakah para penulisnya merepresentasikan TKW tetap melanggengkan wacana dominan yang terjadi selama ini.

Penelitian ini unik karena topik dalam penelitian ini jarang dilakukan. Memang sebelumnya telah ada penelitian yang membahas mengenai representasi TKW dalam novel, namun peneliti melihat nilai lebih dari kedua objek penelitian ini karena dituliskan sendiri oleh TKW yang menjadi tokoh utama. Dengan menggunakan tipe deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sudjana, Nana, & Ibrahim 2007).

Salah satu contoh penelitian yang membahas mengenai representasi TKW dalam karya sastra adalah Representasi TKW di Hong Kong dalam Cerpen-cerpen

pada Kumpulan Cerpen Majikanku Empu Sendok Karya Denok K. Rokhmatika. Dalam penelitian tersebut diperoleh gambaran atau representasi bahwa TKW yang bekerja di Hong Kong berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya namun tidak pernah melepaskan karakter Indonesianya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para TKW mampu untuk mengkritik, melakukan protes sosial, dan melakukan sindiran sebagai akibat dari perlakuan diskriminasi majikan dan pihak penyelenggara (Mantoro 2014).

Novel “Aku Bukan Budak” juga pernah diteliti sebelumnya. Penelitian tersebut berjudul Profil Tokoh Utama dalam Novel Aku Bukan Budak Karya Astina Triutami: Sebuah Telaah Dinamika Kepribadian. Sesuai judulnya, penelitian tersebut lebih berfokus pada kepribadian dan masuk dalam penelitian psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian tokoh utama dalam novel termasuk ke dalam kepribadian bersifat umum, yaitu kepribadian yang menunjukkan kepada sifat umum seseorang, seperti pikiran, kegiatan dan perasaan yang berpengaruh secara sistemik terhadap keseluruhan tingkah lakunya (Simanjourang 2012).

Penelitian lainnya yang juga membahas tokoh novel “Aku Bukan Budak” adalah Citra Tokoh Wanita dalam Novel Aku Bukan Budak Karya Astina Tiutami. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa citra wanita yang coba dihadirkan dalam novel Aku Bukan Budak adalah citra wanita mandiri yang berjuang dari segala kemelut atau permasalahan pekerjaan sebagai bawahan. Citra yang ditampilkan meliputi wanita penyabar, wanita lemah lembut, penyayang, dan peduli terhadap lingkungan (Putri 2013).

Penelitian ini berfokus pada 2 novel Indonesia yaitu “Aku Bukan Budak” karya Astina Triutami dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” karya Ummuki. Kedua novel tersebut ditulis oleh perempuan yang mengaku menuliskan novel tersebut berdasarkan kisah nyata yang mereka alami sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari halaman sampul yang menyatakan bahwa kisah dalam novel tersebut adalah kisah nyata. Misalnya dalam novel “Aku Bukan Budak” terdapat tulisan ‘*True Story*’ dan pada novel “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” dituliskan ‘nonfiksi’ pada sampul belakangnya. Kedua novel ini dipilih karena merupakan 2 novel Indonesia yang mengisahkan mengenai perempuan yang menjadi TKW dan ditulis sendiri oleh TKW yang bersangkutan.

Walaupun menggunakan bahasa yang terkesan seperti *indepth report*, yang mengungkapkan sesuatu yang aktual, namun kedua objek penelitian itu termasuk dalam karya novel. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki syarat-syarat penulisan novel yang mencakup unsur intrinsik seperti tema, setting, penokohan alur/plot, serta sudut pandang, serta memiliki unsur ekstrinsik seperti latar belakang penulisan dan biografi penulis (Aziez & Hakim 2010).

Novel berjudul “Aku Bukan Budak” menceritakan seorang gadis bernama Astina yang terpaksa menjadi TKW di usianya yang masih belia. Bermodalkan ijazah SMP dia memberanikan diri mendaftar di salah satu sponsor yang kemudian mendaftarkannya pada sebuah PJTKI. Novel ini menceritakan pengalaman Astina mulai dari kekerasan yang dialaminya selama menunggu keberangkatan di PJTKI, pemerasan yang dilakukan oknum pemerintah, hingga kekerasan ketika dia sudah bekerja di Hongkong.

Novel kedua berjudul “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” yang ditulis oleh Ummuki. Berbeda dengan novel sebelumnya, dalam novel ini penulis menggunakan nama rekaan untuk menceritakan kisahnya. Novel ini menceritakan tokoh utama yang bernama Hanifa bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Hanifa terpaksa meninggalkan kedua putrinya untuk mencari uang. Diceritakan bahwa Hanifa adalah lulusan S1 dan pernah menjadi ustadzah di sebuah pesantren, namun karena himpitan situasi dan ekonomi dia akhirnya memilih menjadi TKW. Latar belakangnya tersebut memudahkan Hanifa dalam hal komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Namun ternyata hal tersebut juga tidak terlalu banyak membantunya. Dia ternyata juga kerap kali menerima kekerasan yang diantaranya adalah pelecehan seksual, perampasan hak-hak untuk beribadah dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta perlakuan sewenang-wenang dari majikan.

Peneliti tertarik menganalisis wacana TKW karena peneliti ingin mengeksplor bagaimana bahasa dijadikan alat representasi dan artikulasi wacana oleh penulis. Artikulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau praktik produksi makna yang sifatnya aktif melalui simbol-simbol tertentu (Zuriati 2012). Dalam menuliskan novelnya, tentu penulis tidak terlepas dari ideologi yang dibawanya. Bahasa dalam teks juga cenderung merepresentasikan perempuan sebagai objek. Hal ini dikarenakan bahasa bukanlah sesuatu yang netral. Wangs dalam Badara (2012) mengungkapkan bahwa bahasa merupakan praktik sosial. Melalui bahasa tersebut seseorang atau suatu kelompok ditampilkan atau didefinisikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana. Analisis wacana yang digunakan adalah milik Sara Mills yang memang fokus pada masalah feminisme. Melalui metode tersebut peneliti berusaha mengungkapkan adanya ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Jadi penelitian ini berfokus pada wacana TKW dalam novel Indonesia.

I. 2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang bisa diajukan adalah:

1. Bagaimana wacana TKW diartikulasikan dalam novel berjudul “Aku Bukan Budak” dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”?

I. 3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana TKW yang diartikulasikan dalam novel Indonesia yaitu “Aku Bukan Budak” dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”.

I. 4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan seperangkat analisis yang berbentuk deskriptif mengenai artikulasi wacana TKW dalam novel Indonesia. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan analisa untuk penelitian dan laporan yang lebih lengkap bagi peneliti lainnya.

I.5 TINJAUAN PUSTAKA

I. 5. 1 Representasi, Identitas, dan Budaya

Menurut Stuart Hall dalam bukunya *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, representasi adalah ‘produksi makna melalui bahasa’ (2002, h.28). Representasi bisa dihadirkan oleh bahasa karena bahasa beroperasi sebagai sistem representasi (Hall 2002). Representasi adalah ‘tindakan menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol’ (Piliang 2003, h.21). Representasi ini penting dalam dua hal, yakni:

1. Apakah seseorang, kelompok, atau gagasan itu ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata semestinya ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu diberitakan apa adanya atautkah diburukkan. Penggambaran yang tampil bisa jadi adalah penggambaran buruk atau memarjinalkan seseorang atau kelompok tertentu.
2. Bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Dengan kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan foto macam apa yang seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan terhadap khalayak. (Eriyanto 2001).

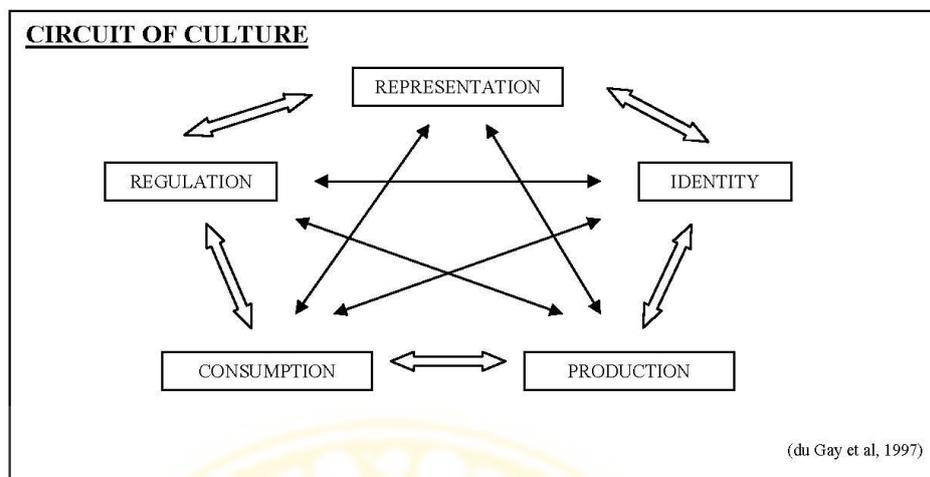
Representasi yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dikenal sebagai misrepresentasi. Dalam suatu teks misrepresentasi ini bisanya dilakukan dalam beberapa cara, yaitu Ekskomunikasi, Eksklusi, Marjinalisasi, dan Delegitimasi. Ekskomunikasi terjadi ketika suatu kelompok dikeluarkan dari

pembicaraan publik. Kelompok tersebut tidak diberi kesempatan untuk berbicara sehingga penggambaran yang terjadi hanya dilakukan oleh sudut pandang kelompok yang dominan.

Eksklusi terjadi ketika seseorang atau suatu kelompok dikucilkan dalam pembicaraan. Dalam eksklusi, pihak subordinat masih diberikan ruang untuk berbicara walaupun sangat minim. Dalam ekskomunikasi dan eksklusi terjadi pemilahan antara “kami” dan “mereka” (*the others*). Marjinalisasi terjadi ketika ada penggambaran buruk pihak lain, namun tidak disertai pemilahan antara pihak kami dan pihak mereka. Sedangkan delegitimasi terjadi ketika seseorang atau suatu kelompok dianggap tidak absah karena tidak memiliki landasan hukum yang sah (Eriyanto 2001).

Stuart Hall menjelaskan bahwa penelitian yang mempertanyakan tentang representasi dari praktik-praktik kehidupan sosial yang memproduksi budaya dan ‘peristiwa’ atau kejadian yang disebut dengan sirkuit atau pusran budaya/ *circuit of culture* (Ida 2011).

Representasi, identitas, dan budaya ini saling terikat satu sama lain. Hall membuat Sirkuit Budaya yang digunakan untuk ‘menggambarkan hubungan antara representasi dengan identitas, regulasi, konsumsi, dan produksi’ (dalam Ida 2011, h.30). Kesatuan tersebut berkaitan dengan bagaimana makna diproduksi melalui penggambaran identitas dan peristiwa yang berhubungan dengan regulasi, konsumsi, produksi, dan akhirnya representasi dalam media massa.



Gambar 1.1 *circuit of culture*

Sirkuit budaya tersebut menggambarkan bagaimana makna diproduksi melalui representasi identitas dalam sebuah media dan peristiwa yang berhubungan dengan regulasi, konsumsi, dan produksi.

Representasi tidak berdiri sendiri, ‘dalam representasi terdapat sistem representasi yang meliputi objek, orang, dan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan seperangkat konsep-konsep atau *mental representations* yang kita bawa dalam benak kepala kita’ (Hall dalam Ida 2011, h.31).

Hall menjelaskan bahwa entitas budaya mengacu pada ‘*whatever is distinctive about the “way of life” of a people, community, nation, or social group*’ (1997, h.2). Dalam tradisi *Cultural Studies*, budaya diartikan sebagai produksi dan pertukaran makna dalam suatu masyarakat. Inti dari budaya tersebut adalah mengenai *shared meaning*. Hal tersebutlah yang menyebabkan seorang anggota dari suatu kebudayaan yang sama bisa memiliki cara pandang yang kurang lebih sama terhadap suatu hal. Seseorang itu kemudian bisa

mengekspresikan apa yang diketahui, apa yang dirasakan, dengan cara yang akan diketahui anggota kelompoknya. Sehingga budaya bergantung pada partisipannya dalam menginterpretasi yang sedang terjadi di sekitar mereka, dan memaknai dunia dengan cara yang sama. Partisipan dalam sebuah kelompok itulah yang memberikan makna pada orang, objek, dan suatu peristiwa. Seseorang itu memberikan makna melalui bagaimana dia merepresentasikannya melalui kata-kata yang digunakan.

Sedangkan bahasa didefinisikan Hall sebagai '*medium in which we make sense of things*' (Hall 1997, h.1). Atau dengan kata lain bahasa merupakan kendaraan yang digunakan untuk membuat budaya menjadi bermakna karena lewat bahasa makna itu diciptakan dan dipertukarkan. Bahasa lah yang mempunyai makna dan kemudian melanggengkan budaya yang ada dengan cara dipertukarkan dari satu agen ke agen yang lain dalam masyarakat.

Bahasa beroperasi dalam *system representasional* sehingga dia mampu menghasilkan makna. Secara tidak langsung bahasa merupakan sentral dari arti (*meaning*) dan budaya. Bahasa merupakan media di mana seseorang bisa merepresentasikan pikiran, ide-ide, maupun ideologi dalam budaya.

Menurut Ida, sistem representasi meliputi tanda dan simbol yaitu objek, orang, dan kejadian peristiwa (*event*) yang berhubungan dengan seperangkat konsep-konsep atau *mental representations* yang kita bawa dalam benak kepala kita (2011). Representasi pada akhirnya menghubungkan antara makna dan bahasa terhadap budaya. Representasi merupakan hal yang penting dari proses di

mana makna diproduksi dan dipertukarkan di antara anggota-anggota dari sebuah budaya, representasi melibatkan penggunaan bahasa, tanda-tanda dan gambar-gambar yang mewakili sesuatu.

Yang biasanya direpresentasikan dalam suatu media adalah identitas. Stuart Hall dalam bukunya *The Question of Cultural Identity* mengungkapkan bahwa identitas muncul sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendefinisikan siapa dirinya. Identitas bukanlah sesuatu yang sifatnya tunggal dan dikonstruksi melalui beragam wacana, posisi, dan aturan. Akan tetapi identitas merupakan produk dari perkembangan sejarah, berproses terus menerus, serta dikarakteristikan oleh perubahan. Sebagai sesuatu yang fluid dan berubah-ubah, identitas tidak pernah lepas dari permainan kekuasaan yang melingkupinya (Fitranisa 2011). Identitas tersebut dibentuk melalui proses representasi, termasuk merefleksikan “siapa diri kita” atau “dimana kita berasal”, identitas dipandang sebagai suatu konsep bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita direpresentasikan, dan bagaimana pandangan orang lain atas apa yang kita representasikan.

Karena sifatnya yang *fluid*, identitas tidak pernah lepas dari permainan kekuasaan yang melingkupinya (Hoon dalam Fitranisa, 2011). Kekuasaan untuk mengkonstruksi identitas biasanya terletak pada pembuat kebijakan. Pembentukan identitas oleh pembuat kebijakan itu berdasarkan pada faktor biologis seperti ras, etnisitas, dan lain sebagainya.

I. 5. 2 Representasi Perempuan dalam Media

Ketidakadilan terhadap perempuan ditampilkan dalam berbagai bentuk representasi di media massa. Strinati dalam bukunya *Popular Culture* mengatakan bahwa 'representasi laki-laki dan perempuan dalam media selaras dengan stereotipe-stereotipe kultural yang berfungsi untuk mereproduksi peranan-peranan jenis kelamin secara tradisional' (2004, h.211). Penggambaran yang diterima dan diyakini oleh masyarakat ini kemudian berkembang sebagai wacana dominan (*Dominant Discourse*). Misalnya saja seperti penggambaran laki-laki yang gagah, berani, logis, sedangkan perempuan digambarkan lemah lembut, sabar, penyayang, dan emosional.

Lewat suatu teks, yaitu novel, seseorang atau suatu kelompok bisa menggunakannya sebagai sarana sekaligus media melalui mana satu kelompok mengunggulkan diri sendiri dan memarjinalkan kelompok lain (Eriyanto 2001). Istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan, penggambaran, atau suatu cerita (Piliang 2003).

Bahasa adalah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi (Hall 1997). Lewat bahasa media itu lah representasi-representasi diciptakan, baik dengan menggunakan medium kata-kata, gambar, suara, dan sebagainya. Bisa kita lihat contohnya pada iklan-iklan media yang menampilkan perempuan. Perempuan selalu dijadikan

objek eksploitasi, entah itu seksualitas tubuhnya, maupun menjadi objek sebagai kaum kedua di masyarakat.

Pada pemberitaan-pemberitaan mengenai perkosaan misalnya, perempuan menjadi korban tidak hanya satu kali. Penggunaan-penggunaan bahasa dalam media seperti ‘dilakukan atas dasar suka sama suka’, ‘digagahi’, dan juga kalimat seperti ‘pemeriksaan dilakukan karena korban berpakaian seksi’, merupakan suatu bentuk-bentuk pengopresian dan pamarjinalan perempuan.

Begitu pula ketika membahas mengenai TKW, maka pemberitaan-pemberitaan yang muncul dalam media adalah berita mengenai kekerasan berupa penyiksaan, penganiayaan, pemeriksaan, bahkan pembunuhan, serta beberapa pemberitaan tragis lainnya. Representasi demikianlah yang kemudian menciptakan sekaligus melanggengkan wacana dominan mengenai TKW.

I. 5. 3 Bahasa, Kekuasaan, dan Relasi Kuasa

Menurut Weber kekuasaan merupakan ‘kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu’ (dalam Santoso 2002). Dengan pengertian tersebut, kekuasaan dianggap sebagai suatu bentuk kemampuan mewujudkan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan, dengan apapun dasar kemampuan itu diperoleh dalam hubungan sosial. Pengertian tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang negatif dan opresif.

Kekuasaan dianggap sebagai wujud kemampuan seseorang memaksa orang lain yang resisten agar rela mematuhi perintahnya. Kerelaan atau kepatuhan menjalankan perintah orang lain semacam ini dapat saja muncul karena berbagai dorongan, misalnya karena tekanan kewajiban, rasa takut, kebodohan, keuntungan pribadi, kesamaan nilai yang dianut, emosi, atau motif ideal perasaan solidaritas.

Karena hal itulah, suatu kelompok yang merasa kedudukannya lebih tinggi berusaha merasionalisasi aturannya sehingga otoritas sebenarnya adalah topeng kekuasaan. Elite pemerintahan menjustifikasi kekuasaannya secara *de facto* dan juga berusaha menemukan dasar moral dal legalnya (Santoso 2002).

Definisi tersebut berbeda dengan definisi yang diajukan oleh Foucault. Foucault melihat kekuasaan bukanlah sebagai sesuatu yang dimiliki. Menurutnya kekuasaan merupakan sebuah strategi. Kekuasaan harusnya dilihat sebagai suatu kata kerja, bukan kata benda. Lebih lanjut Foucault mengungkapkan bahwa:

Power must be analysed as something which circulates, or as something which only functions in the form of a chain . . . Power is employed and exercised through a netlike organisation . . . Individuals are the vehicles of power, not its points of application.
(dalam Mills 2003, h.35)

Pengertian tersebut mengandung dua poin penting. Pertama, kekuasaan berfungsi dalam sebuah jalinan atau rantai, bukan hanya sebagai hubungan antara yang menindas dan yang ditindas. Dalam jalinan tersebut terjadi suatu relasi kuasa yang berlangsung terus menerus. Relasi kuasa itu bisa berupa hubungan keluarga, hubungan yang terjadi dalam sebuah institusi, dan lain sebagainya. Kedua, individu seharusnya dilihat bukan sebagai objek yang menerima praktek

kekuasaan, melainkan harus dilihat sebagai aktor yang ikut ‘bertarung’ atau dilihat sebagai ‘tempat’ di mana kekuasaan itu ditetapkan dan ditentang (Mills 2003).

Kekuasaan menurut Foucault (dalam Adiptojo 2004) dianggap sebagai sesuatu yang jamak, positif, produktif, dan relasional. Kekuasaan hadir di dalam semua relasi sosial dan hadir di mana-mana (*omnipresent*). Dengan penjelasan tersebut, kekuasaan dianggap tidak hanya terdapat dalam praktik kehidupan bernegara, tetapi juga hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan wujud yang halus dan tidak disadari.

Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang negatif. Kekuasaan dianggap sebagai suatu keniscayaan yang selalu hadir dalam setiap interaksi manusia, termasuk dalam bahasa. Relasi kekuasaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang linear atau vertikal, yang diopresi dari atas ke bawah yang digunakan untuk menindas. Karena itulah kekuasaan dilihat sebagai suatu potensi yang bersirkulasi terus-menerus yang membentuk kreativitas dan produktivitas budaya.

Kekuasaan selalu hadir dalam susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Di mana saja manusia juga memiliki hubungan tertentu. Dalam hal itulah kuasa bekerja. Lewat masyarakat kekuasaan disirkulasikan. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu dari dalam (Foucault dalam Eriyanto 2001).

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, kekuasaan sebenarnya tidak dimiliki oleh salah satu pihak saja. Kekuasaan ada di manapun, diperebutkan, dan bisa diakses semua orang. Walaupun pada kenyataannya, yang memiliki

kesempatan lebih besar lah yang akan memiliki kekuasaan itu. Negara misalnya, dengan memiliki landasan hukum yang abash mampu mendapatkan kekuasaan dibandingkan rakyat. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan diperebutkan terus menerus dalam sebuah relasi kuasa. Foucault mengakui pelaksanaan kuasa laki-laki atas perempuan, tetapi menolak bahwa laki-laki memegang kuasa atas perempuan itu (Zuriati 2011).

Perlawanan merupakan suatu hal yang integral dengan kekuasaan. Foucault dalam bukunya yang berjudul *The History of Sexuality* menyebutkan ‘*where there is power there is resistance*’ (dalam Mills 2003, h.40). Bahkan kekuasaan juga dianggap sebagai kemampuan untuk melawan resistensi itu.

Bahasa juga memiliki kaitan dengan kekuasaan. Praktik sosial pemilihan dan penggunaan bahasa berkaitan dengan kekuasaan. Hal tersebutlah yang kemudian juga disebut sebagai relasi kuasa, di mana kuasa masuk dalam sebuah bahasa (teks) kemudian menjadi wacana (Zuriati 2011). Jurgen Habermas menyatakan bahwa bahasa selalu menjadi medium dominasi dan sistem reproduksi material dan ideasional (Adiptyo 2004). Praktik kekuasaan dapat dikonstruksi dalam bahasa, sedangkan pilihan bahasa dan konstruksi wacana dimanipulasi oleh kekuasaan. Implikasinya, bahasa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang netral, tetapi sebagai tempat dimana bertarungnya wacana dan kekuasaan.

Bahasa sebagai sarana komunikasi memiliki makna ganda, bahkan bias. Bahasa bahkan juga dikaitkan dengan kekuasaan. Bahasa ini pula yang digunakan untuk menciptakan simbol-simbol atau wacana hegemonik (Murniati, 2004). Di sini penulis dalam suatu media massa merupakan pihak yang memiliki kuasa yang mana melalui bahasanya mampu merepresentasikan sesuatu sesuai dengan *frame of reference* dan *field of expericeny*. Penulis juga akan dipengaruhi oleh ideologi maupun sistem-sistem yang berkembang di sekitarnya.

Novel sebagai media masa yang notabene mediumnya berupa bahasa sangat memungkinkan adanya kekerasan simbolik melalui bahasanya. Penulis menggunakan medium bahasa bisa melakukan pemarjinalan salah satu gender. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu konsekuensi dari adanya representasi adalah membuat seseorang atau suatu kelompok tertentu digambarkan tidak sesuai aslinya, bahkan diperburuk.

Bahasa-bahasa hasil reproduksi kuasa yang memarjinalkan perempuan adalah bahasa yang menurut Azis ‘cenderung dominatif, penuh ambisi-ambisi yang “terkurung” dalam berbagai ekstasi politik yang berbeda’ (Azis 2007, h.17). Sebenarnya, yang bisa dimarjinalkan oleh penggunaan bahasa adalah laki-laki dan perempuan. Namun dalam prakteknya, perempuan lah yang lebih sering dimarjinalkan.

Menurut Spender dalam Kuntjara, bahasa telah dimanfaatkan oleh kelompok yang dominan (biasanya laki-laki) untuk menekan kaum perempuan (2004). Namun pada prakteknya, perempuan yang terhegemoni bisa pula

melakukan demikian. Mereka yang selama ini telah terhegemoni ideologi patriarki kemudian bisa berpikir menggunakan landasan patriarki sehingga pandangan maupun kata-kata yang mereka gunakan cenderung *male gaze*.

I.5.4 Teori Feminis Marxis

Gerakan feminisme merupakan gerakan yang mencoba melakukan pembacaan ulang atas berbagai konstruksi ketidakadilan gender serta stereotipe yang merendahkan wanita di masyarakat. Ketidakadilan dan stereotipe itu menyebabkan perempuan tersubordinasi dan dianggap sebagai kaum kedua. Hal tersebutlah yang coba dikaji ulang oleh kaum feminis (Tong 2008). Feminis mengensipasi agar para perempuan berpikir dengan pemikirannya sendiri.

Gerakan ini dilakukan oleh sekelompok perempuan yang menolak bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat manusia. Mereka menuntut bahwa ketidaksetaraan itu harus dipertanyakan. Feminis menganggap bahwa selama ini hierarkis yang terjadi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya selalu androsentris atau berpusat pada laki-laki (Jackson & Jones 2009). Hal itulah yang kemudian disebut sebagai patriarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang mementingkan garis keturunan bapak. Bapak menguasai seluruh anggota keluarga, harta miliknya, serta sumber-sumber ekonomi. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan harus rela dikuasai bahkan dianggap sebagai milik laki-

laki (Poedjiati 2011). Keberadaan patriarki dianggap sangat merugikan perempuan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Rosemarie Putnam Tong. Menurutnya feminis gelombang pertama (liberal, radikal, dan marxis/sosialis) dan feminis awal gelombang kedua (psikoanalisis) melihat diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan terutama disebabkan oleh budaya patriarki dan kapitalisme yang mengental. Secara harfiah arti patriarki adalah “aturan laki-laki” atau “prinsip dominasi pria atas perempuan” (Tong 2008).

Lahirnya gerakan feminisme berusaha untuk menuntut persamaan hak perempuan dengan laki-laki. Tomy (dalam Santoso & Angraini 2004) mengatakan bahwa feminisme bukanlah berarti sebuah paham yang bertujuan untuk mengunggulkan perempuan yang kemudian berbalik merepresi laki-laki. Feminisme didasari oleh persoalan dasar kehidupan bahwa ada hak-hak kemanusiaan yang perlu diperjuangkan ketika hak-hak tersebut terpinggirkan oleh ketimpangan gender. Semangat yang dijunjung dalam feminisme adalah kesetaraan.

Simone de Beauvoir mengatakan bahwa perempuan masih diposisikan sebagai *the second sex* atau *being for others* (ada untuk orang lain). Hal tersebut dikuatkan dengan wacana yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini kemudian menyebabkan adanya pemikiran yang wajar ketika laki-laki merasa superior dibandingkan dengan perempuan (dalam Santoso

& Anggraini 2004). Dengan pemikiran seperti itu, kaum perempuan menjadi semakin terpinggirkan.

Teori feminis yang fokus menangani masalah buruh perempuan yang teropresi oleh kapitalisme dan laki-laki adalah feminis marxis/sosialis. Beberapa ahli membedakan antara feminis marxis dan feminis sosialis, sedangkan beberapa yang lain menganggapnya sama. Menurut Tong, perbedaan itu hanya masalah penekanan saja, bukan masalah substansi (2008). Feminis Marxis menganggap opresi terhadap perempuan diakibatkan oleh pembagian kelas, sedangkan Feminis Sosialis menganggap bahwa opresi itu akibat kapitalisme dan patriarki. Keduanya percaya bahwa 'opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu hidup' (Tong 2008, h.139). Tong kemudian menyimpulkan bahwa perbedaan itu tidak terlalu penting.

Teori Feminis Marxis melihat operasi patriarki tumbuh subur pada kapitalisme modern. Kapitalisme dianggap bernilai patriarki karena penekanan pada pembagian kerja seksual, peran reproduktif perempuan, atau distribusi ekonomi yang tidak merata. Teori feminis marxis berusaha untuk menguraikan kapitalisme dan patriarki yang berhubungan dengan penindasan kelas dan gender, serta pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Feminis Marxis menggambarkan posisi rendah perempuan dalam ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis (Jackson & Sorensen 2005).

Letak ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam teori feminisme marxis yaitu ketika laki-laki melakukan suatu pekerjaan di ruang publik mendapatkan upah. Hal yang berbeda terjadi ketika perempuan yang melakukan pekerjaan di ranah domestik, mereka tidak mendapatkan upah. Kalaupun bekerja di ranah publik, upah itu tidak sebesar yang didapatkan laki-laki. Pekerjaan yang dilakukan di ranah publik itu pun biasanya merupakan perpanjangan dari pekerjaan domestik, seperti pembantu rumah tangga, pelayan toko, dan pengasuh bayi. Hal ini juga terjadi kepada perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga, yang juga dialami oleh para TKW.

Majikan dianggap sebagai kaum borjuis sedangkan pembantu dianggap sebagai kaum proletar. Perempuan dijadikan objek dan dieksploitasi oleh pemilik modal atau kaum borjuis (Azizah dalam Rahayu 2014). Feminis Marxis memandang perempuan dari sudut teori kelas. Dalam sudut pandang tersebut, perempuan dianggap sebagai kelas masyarakat yang tertindas.

Selain mendasarkan pemikirannya kepada pemikiran Marx, teori Feminis Marxis juga menggunakan pemikiran Friedrich Engels yang menyatakan bahwa kaum perempuan 'jatuh' karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Dulunya, kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hal tersebut didominasi oleh kaum perempuan karena mereka mampu untuk menyediakan keperluan seluruh keluarga atau suku. Hal itu menurut Engels bukan subordinasi perempuan atas laki-laki, melainkan disebut sebagai kekuatan ekonomi perempuan (dalam Tong 2008). Namun kemudian, kegiatan produksi itu berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol kegiatan

pertukaran sehingga mengambil alih dominasi perempuan karena memang dasar dari kapitalisme merupakan ‘suatu sistem hubungan kekuasaan dan juga hubungan pertukaran’ (Tong 2008, h.141).

Fokus dari teori marxis ini terletak pada permasalahan tentang pekerjaan perempuan. Pekerjaan perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sulit dilakukan. Tidak dibutuhkan adanya tingkat intelegen dan keterampilan yang tinggi. Pada mulanya pekerjaan perempuan seperti memasak dan merawat adalah pekerjaan sentral. Namun dengan industrialisasi dan transfer produksi barang-barang dari rumah tangga ke tempat kerja publik, perempuan yang tidak bekerja di luar rumah mendapat cap sebagai orang yang nonproduktif (Tong 2008).

Aliran feminis marxis memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Feminis marxis percaya bahwa kapitalisme hanya dapat membuat “sukses” sejumlah kecil perempuan. Kestaraan penuh bagi perempuan dianggap tidak bisa terwujud di bawah kapitalisme. Kapitalisme berdasarkan pada peranan sedikit orang yang berkuasa. Orang berkuasa ini memiliki modal yang biasanya berupa sumber ekonomi. Modal tersebut digunakan untuk penimbunan keuntungan pemilik modal yang menyebabkan perampasan, eksploitasi, dan penindasan mayoritas yang tidak memiliki modal.

Jika dikaitkan dengan wacana mengenai TKW, TKW yang menjadi pembantu dieksploitasi oleh majikan. Majikan mempunyai monopoli terhadap modal. Pekerja harus memilih antara dieksploitasi atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Dalam hal ini para pekerja perlahan meyakinkan diri

mereka bahwa meskipun sulit menjadi pembantu, namun itu yang harus dijalani. Mereka merasa tidak memiliki pilihan sehingga menukarkan tenaga mereka dengan gaji.

I. 5. 5 Analisis Wacana Sara Mills

Menurut Foucault, wacana selalu berkaitan dengan kepentingan, nilai, atau ideologi tertentu. Suatu teks atau diskurs tidak berdiri sendiri. Dalam produksi, distribusi, maupun konsumsinya selalu dipengaruhi oleh konteks, baik itu konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya (dalam Mills 1997). Foucault dalam Ida mengartikan diskursus-diskursus (*discourses*) sebagai ‘seperangkat ide-ide yang disirkulasikan ke dalam masyarakat dan praktik-praktik social yang terlibat ketika orang berbicara dan di dalam cara-cara mereka menyampaikan pembicaraannya (misalnya birokrat, politisi, dokter, polisi, petugas imigrasi, dan sebagainya)’ (Ida 2011, h.61). Diskursus tidak hadir dalam suatu isolasi, melainkan menjadi objek dan ‘*site of struggle*’. Akibatnya diskursus bukanlah sesuatu yang tetap (*fixed*) (Mills 1997).

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa analisis teks tidak berhenti pada ranah produksi saja, melainkan mengaitkan diri pada jejaring wacana sosial lainnya yang juga harus dibaca untuk mengerti dengan jelas makna dibalik suatu teks. Wacana sosial disini didefinisikan sebagai sekumpulan kepentingan yang selalu menyertai isu-isu yang diperbincangkan melalui medium tertentu. Bagi Foucault, ‘kekuasaan selalu terartikulasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu punya efek kuasa’ (dalam Eriyanto 2001, h.66).

Analisis wacana merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mengungkap serta membongkar makna dibalik sebuah teks, melihat bagaimana suatu proses produksi teks dan konteks sosial turut mempengaruhi bagaimana teks tersebut dibentuk (Eriyanto 2001). Jadi analisis wacana tidak hanya melihat dari sisi produksi semata, tetapi lebih melihat ke dalam bagaimana teks diterima atau diresepsi oleh pembaca. Salah satu jenis analisis wacana adalah milik Sara Mills.

Analisis wacana milik Sara Mills fokus pada wacana tentang feminitas. Analisis ini membahas bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, atau berita. Karena itu metode yang dilakukan Sara Mills sering disebut sebagai wacana berspektif feminis yang menunjukkan bagaimana teks menempatkan perempuan (Mills dalam Fitriana, 2011, h.I-26). Perempuan cenderung ditampilkan dalam teks sebagai sosok yang tersubordinat dibandingkan pihak laki-laki. Ketidakadilan penggambaran perempuan inilah yang menjadi fokus dari tulisan Mills.

Gagasan Mills ini agak berbeda dengan model *critical linguistic* yang 'lebih terpusat pada struktur kebahasaan dan pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak' (Mills 1997, h.136). Sara Mills lebih melihat pada posisi-posisi aktor yang ditampilkan dalam suatu teks. Posisi-posisi ini menunjukkan siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan. Selain posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks dan bagaimana pembaca mengidentifikasi dirinya serta menempatkan diri dalam penceritaan teks.

Posisi pembaca mempengaruhi bagaimana teks akan dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ditempatkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan yang lainnya menjadi *illegitimate*.

Seperti analisis wacana lain, Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam suatu wacana akan mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak (Mills dalam Eriyanto 2001, h.200).

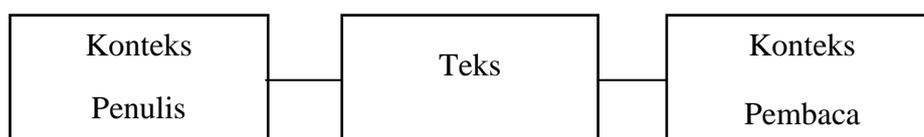
Dalam pemikiran Sara Mills, kita perlu mengkritisi bagaimana peristiwa ditampilkan dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat diposisikan dalam teks. Eriyanto menjelaskan bahwa posisi-posisi yang dimaksud tersebut adalah:

Siapakah aktor yang dijadikan subjek yang mendefinisikan dan melakukan penceritaan dan siapakah yang ditampilkan sebagai objek, pihak yang didefinisikan dan digambarkan kehadirannya oleh orang lain (2001, h.202).

Dalam suatu teks umumnya perempuan menjadi objek. Karena posisinya sebagai objek representasi, maka posisi perempuan selalu didefinisikan, dijadikan bahan penceritaan, dan tidak bisa menampilkan dirinya sendiri.

Pembaca memiliki peran yang penting dalam analisis wacana Sara Mills. Menurut Mills teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Untuk itu Mills membuat suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lainnya. Dalam bukunya, Eriyanto menjelaskan bahwa pandangan tersebut memiliki beberapa kelebihan.

Pertama model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. Kedua, posisi pembaca di sini ditempatkan dalam posisi yang penting (2001, h.204).



Gambar I.2: Model Konteks dalam Analisis Wacana (Eriyanto 2001, h.205)

Ada dua hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana pembacaan dominan (*dominant reading*) atas suatu teks. Apakah teks lebih ditujukan untuk pembaca perempuan atau laki-laki. Kedua, bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca. Aspek kedua ini melihat kepada siapa pembaca cenderung mengidentifikasi dirinya dalam teks.

Posisi yang dijelaskan di atas mempunyai kaitan erat dengan ideologi. Pemosisian satu kelompok pada dasarnya membuat suatu kelompok mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Jika dibuat tabel, maka kerangka analisis wacana Sara Mills adalah sebagai berikut:

Tabel I.1: Aspek-aspek dalam Analisis Wacana Milik Sara Mills (Eriyanto 2001, h.211)

Tingkat	Aspek yang ingin dilihat
Posisi Subjek-Objek	Bagaimana peristiwa dilihat, dari kaca mata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai

	pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, atau kehadirannya dimunculkan oleh pihak lain.
Posisi Penulis- Pembaca	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok mana pembaca mengidentifikasi dirinya.

I. 6 METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada bagaimana novel Indonesia mengartikulasikan wacana TKW. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2012).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai wacana TKW yang diartikulasikan dalam novel Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya

sebagaimana adanya (Setyosari 2010). Namun peneliti juga berusaha mengkaitkannya dengan peristiwa aktual guna mendukung intertekstualitas penelitian.

I.6.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis wacana milik Sara Mills. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis posisi subjek dan objek serta posisi penulis dan pembaca dalam teks novel “Aku Bukan Budak” serta “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”.

Analisis dikursif milik Sara mills dikenal sebagai wacana berperspektif feminis dimana fokusnya adalah bagaimana teks cenderung bias dalam merepresentasikan sosok perempuan. Dalam teks, terjadi kecenderungan ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih sering diposisikan sebagai kaum yang teropresi atau termarginalkan.

Penggunaan analisis wacana dalam penelitian ini memang dimaksudkan untuk membongkar maksud tersembunyi (*hidden truth*) dari teks yang disampaikan penulis novel. Cara pengungkapannya yaitu dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dalam teks lalu melakukan penafsiran dengan mengikuti struktur makna dari sang pembicara (Eriyanto 2001, h.5-6).

Analisis wacana juga biasanya digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa, yaitu mengenai batasan-batasan yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang digunakan, dan topik apa yang dibicarakan. Bahasa dilihat sebagai ‘aspek yang selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan,

terutama pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat' (Eriyanto 2001, h.6).

Peneliti diharapkan bisa menghubungkan bahasa dengan konteks sosial yang melingkupinya, mengungkap praktik wacana bermuatan ideologi yang menggambarkan kekuasaan yang timpang antara kaum berkuasa dan kaum marginal yang direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan.

I.6.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kata-kata, kalimat, atau narasi yang memuat wacana TKW dalam novel "Aku Bukan Budak" dan "Dari Tanah Haram ke Ranah Minang".

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan membaca keseluruhan novel yang berjudul "Aku Bukan Budak" dan "Dari Tanah Haram ke Ranah Minang". Data primer itu berupa kata-kata dan kalimat dalam kedua novel tersebut. Teknik yang dilakukan selanjutnya adalah memilih teks yang memuat wacana mengenai perempuan yang menjadi TKW.

Selain menggunakan data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa skripsi, jurnal, maupun karya literatur lain yang bisa dijadikan referensi.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan beberapa tahapan.

Tahapan teknik analisis data itu diantaranya adalah:

- Menyeleksi mana kata, kalimat, atau teks-teks yang sesuai, atau dalam hal ini merepresentasikan dan mewacanakan perempuan yang menjadi TKW dan mana yang bukan.
- Mengklasifikasikan teks mana yang relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai wacana TKW.
- Menganalisis teks yang mewacanakan perempuan yang menjadi TKW dengan menggunakan analisis wacana milik Sara Mills dengan cara:
 1. Peneliti menganalisis kata dan kalimat yang dianggap mampu menjawab artikulasi wacana perempuan yang menjadi TKW
 2. Peneliti menganalisis kata ganti pada teks yang merujuk pada para aktor untuk mengungkap posisi subjek dan objek dalam teks sekaligus mengidentifikasi pemaknaan yang muncul dari pembaca sebagai bentuk negosiasi antara penulis dan pembaca dalam menentukan wacana perempuan yang menjadi TKW dalam novel “Aku Bukan Budak” dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”.
- Menginterpretasi hasil analisis tersebut dan menurunkannya dalam laporan tertulis.
- Membuat kesimpulan pada mengenai artikulasi wacana perempuan yang menjadi TKW dalam novel “Aku Bukan Budak” dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”.